

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik, persekusi, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai belahan dunia telah menyebabkan jumlah pengungsi meningkat secara signifikan. Menurut laporan UNHCR (Badan Pengungsi PBB) mengenai Tren Pengungsi Global pada tahun 2014, jumlah pengungsi di dunia telah mencapai angka 19,5 juta orang. Selanjutnya, pada September 2021, angka pengungsi mengalami peningkatan hingga mencapai angka 82,4 juta pengungsi di seluruh dunia. Angka tersebut mencerminkan kompleksitas dan urgensi masalah pengungsi global. Konflik bersenjata, perang saudara, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakstabilan politik, dan bencana alam merupakan beberapa faktor utama yang memaksa seseorang melarikan diri dari wilayahnya dan mencari perlindungan di tempat lain. Tantangan ini menempatkan beban besar pada negara-negara tujuan yang menerima pengungsi dan juga mengharuskan komunitas internasional untuk bekerja sama dalam menyediakan bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan solusi jangka Panjang baru para pengungsi (Rosyid, 2019).

Hal serupa terjadi di Myanmar, yang saat ini menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat parah. Istilah "konflik Rohingya" mengacu pada konflik yang terjadi antara kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. Majoritas kelompok etnis Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine di barat laut Myanmar. Ada banyak aspek konflik ini, termasuk agama, etnis, dan hak asasi manusia. Pemerintah Myanmar belum pernah memberikan pengakuan resmi kepada kelompok etnis Rohingya, yang mayoritas beragama Muslim. Karena karakteristik fisik dan budaya mereka, mereka dianggap sebagai kaum Bangladesh dan dianggap sebagai imigran ilegal. Karena mereka adalah Muslim di negara yang mayoritas

penduduknya beragama Budha, orang Rohingya dianggap sebagai "orang asing."

Pada tahun 2000, diskriminasi dan kekerasan struktural terhadap etnis Rohingya semakin meningkat, menyebabkan mereka menderita di negara mereka sendiri. Kekerasan dan pengungsian terjadi sebagai akibat dari konflik Rohingya. Konflik ini memicu terjadi kekerasan dan pengungsian terhadap etnis Rohingya. Konflik Rohingya disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan, pemerkosaan massal, penyiksaan, dan penghancuran desa-desa Rohingya. Adanya tindak kekerasan dari pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya juga mengakibatkan kemiskinan, kesengsaraan, dan pengungsian besar-besaran. Pengungsian massal Rohingya telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang signifikan. Krisis ini mendapat kritikan dari berbagai negara dan organisasi internasional yang fokus pada krisis kemanusiaan yang tengah terjadi di Myanmar (Karina, 2020).

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi regional di Asia Tenggara yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik di Myanmar namun nyatanya masih belum bisa melakukan banyak tindakan. Hal ini karena ASEAN terjebak dalam prinsip yang dipegangnya yakni tidak saling mengintervensi pada urusan internal masing-masing negara yang harus dihormati. Konflik di Rohingya telah memunculkan tantangan bagi ASEAN, terutama dalam hal menjaga solidaritas dan mencari solusi yang mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai anggota ASEAN, Myanmar memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya bersama untuk menyelesaikan krisis tersebut dan menghormati prinsip-prinsip yang dianut oleh ASEAN, termasuk perlindungan hak asasi manusia.

Selama konflik di Rohingya, respons dan sikap Myanmar dianggap bervariasi di antara negara-negara anggota ASEAN. Beberapa anggota ASEAN mengambil sikap tegas dalam mengecam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, sementara yang lain mengadvokasi pendekatan diplomasi dan dialog untuk menyelesaikan krisis. Dalam hal ini, ASEAN memainkan peran sebagai forum di mana negara-negara anggota dapat bertemu, berdiskusi, dan mencari solusi bersama untuk konflik di Rohingya. ASEAN juga memainkan peran dalam memfasilitasi dialog antara Myanmar dan negara-negara lain dalam upaya mencapai pemulihan dan rekonsiliasi yang berkelanjutan (Maliki, 2021).

Beberapa negara anggota ASEAN yang sangat terlibat aktif dalam konflik di Myanmar adalah Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Sedangkan negara lainnya seperti Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Laos, Vietnam, dan Kamboja, berpartisipasi dalam upaya kolektif ASEAN untuk mempromosikan stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut. ASEAN telah terlibat dalam upaya diplomatik untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar melalui dialog dan mediasi antara pihak yang terlibat konflik. Sedangkan Malaysia, Thailand, dan Indonesia melakukan keterlibatan yang cukup aktif dalam konflik ini.

Malaysia telah mengambil beberapa tindakan untuk menangani masalah di Myanmar, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam konflik di negara tersebut. Mengenai krisis kemanusiaan di Myanmar, pemerintah Malaysia secara tegas mengutuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Sebagai anggota ASEAN, Malaysia telah berpartisipasi dalam upaya ASEAN untuk mengatasi masalah di Myanmar melalui diplomasi. Pengungsi dari Myanmar yang melarikan diri dari konflik telah ditempatkan di penampungan pengungsi Malaysia. Rakyat Myanmar yang terdampak konflik telah menerima bantuan kemanusiaan dari Malaysia melalui organisasi

kemanusiaan dan badan amal. Bantuan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya termasuk dalam kategori bantuan ini (Karina, 2020).

Thailand telah mengambil beberapa langkah terkait krisis kemanusiaan di Myanmar ialah Posisi diplomatik, Pemerintah Thailand secara terbuka menyatakan keprihatinan mereka terhadap situasi di Myanmar. Mereka mengimbau semua pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghormati hak asasi manusia. Diplomasi dan mediasi, Thailand sebagai anggota ASEAN, telah berperan dalam upaya ASEAN untuk menangani krisis di Myanmar. Penerima pengungsi, Thailand sebagai negara tetangga Myanmar, telah menerima sejumlah pengungsi dari Myanmar yang melarikan diri dari konflik. Thailand telah memberikan perlindungan dan tempat penampungan bagi mereka, meskipun masalah terkait perlakuan terhadap pengungsi dan hak asasi manusia telah menjadi perhatian dalam beberapa kasus (UNHCR, UNHCR Thailand Protection achievements and challenges on the Thai Myanmar border, 2016).

Indonesia memang memiliki peran yang menonjol dalam menangani konflik di Rohingya. Namun sebelumnya Indonesia memang mungkin tidak memiliki perhatian yang begitu besar terhadap masalah Rohingya sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun terkini. Bahkan keterlibatan Indonesia dalam konflik Rohingya di Myanmar masih sangat jauh tertinggal atau kalah dari Malaysia. Indonesia telah membantu orang Rohingya sejak tahun 2017, tetapi beberapa tahun terakhir ini Indonesia terlihat lebih aktif terlibat dalam konflik di Myanmar. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin pertama kali mengumumkan tekad membantu konflik di Myanmar di Jakarta pada 5 Februari 2021. Peristiwa ini terjadi hanya empat hari setelah militer Myanmar memegang kekuasaan atas pemerintah sipil di Myanmar (Sukma N. A., 2021).

Keterlibatan Aktif Indonesia pada Konflik di Myanmar ini menaruh banyak pertanyaan dan kecurigaan sebenarnya apa yang menjadi alasan utama dibalik keterlibatan Indonesia terhadap krisis Rohingya di Myanmar. Apa sebenarnya kepentingan Indonesia dalam tindakannya kali ini. Sejauh ini Indonesia telah memberikan banyak bantuan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya begitu juga dengan diplomasi yang dilakukan kepada pihak pemerintah Myanmar. Indonesia benar-benar sudah bergerak begitu jauh untuk memperjuangkan keadilan dan keamanan etnis Rohingya di Myanmar.

Salah satu tempat paling populer untuk pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari konflik di Myanmar adalah Malaysia dan Indonesia. Mereka bergabung dengan negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, dan India, serta Malaysia dan Indonesia. Negara-negara ini telah menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, dan penindasan di Myanmar dan mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. Sebagai negara-negara yang dekat dengan wilayah konflik, Malaysia dan Indonesia sangat membantu pengungsi Rohingya dengan bantuan kemanusiaan, tempat perlindungan, dan akses ke makanan, air bersih, dokter, dan Pendidikan (Karina, 2020).

Indonesia telah bertindak untuk membantu orang-orang yang mengungsi ke Rohingya. Sejak tahun 2010, UNHCR dianggap sebagai referensi bagi para pencari suaka atau status pengungsi di Indonesia, menurut instruksi yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Keimigrasian Indonesia. Selain itu, instruksi tersebut menjelaskan bahwa pencari suaka dapat ditempatkan di lokasi tertentu dengan fasilitas UNHCR atau organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi. Sehubungan dengan keadaan pengungsi Rohingya, Malaysia dan Indonesia telah menetapkan kebijakan berdasarkan tiga perspektif utama:

politik domestik, keamanan, dan tindakan UNHCR (ham, 2015).

Sepanjang 2015, 30 negara menerima 107.100 pengungsi, termasuk Indonesia. Indonesia berhasil memulangkan 800 orang Rohingya yang terdampar di pesisir timur Aceh pada tahun 2015. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia ini sejalan dengan sistem politiknya yang bebas aktif di luar negeri. Berbeda dengan aktif, bebas berarti berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian global dan menyelesaikan masalah internasional. Untuk menunjukkan bahwa Indonesia peduli dengan kehidupan global dan mendukung etnis minoritas yang menderita karena arogansi negara atau etnis mayoritas, Indonesia melakukan politik bebas dan aktif.

Dalam konteks etnis minoritas yang menderita atas arogansi negara atau etnis mayoritas, Indonesia berupaya untuk menjadi mediator dan penghubung antara pihak-pihak yang terlibat untuk mendorong dialog, negosiasi, dan pemecahan masalah secara damai. Indonesia telah terlibat dalam berbagai upaya diplomasi di tingkat regional dan internasional untuk mempromosikan hak-hak etnis minoritas dan mendorong penyelesaian konflik. Sebagai negara dengan pluralitas etnis dan agama, Indonesia dapat mengajukan contoh dan pengalaman dalam mengatasi perbedaan dan membangun harmoni sosial (Rosyid, 2019).

Indonesia terlibat dalam konflik dengan melakukan upaya mediasi penyelesaian konflik di Myanmar. Di Myanmar, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN telah berusaha untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan dialog. Indonesia tetap menghormati pemerintah Myanmar dan telah melakukan banyak upaya untuk menyelesaikan konflik etnis di wilayah Rakhine. Di tahun 2017, Presiden Joko Widodo menunjuk Retno Marsudi sebagai perwakilan pemerintah Indonesia untuk menangani krisis Rohingya. Retno Marsudi melakukan berbagai upaya diplomasi untuk mengatasi krisis kemanusiaan ini. Salah

satu tindakan konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh (Rosyid, 2019).

Peran sebagai mediator dan penghubung akan melibatkan upaya untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai, mendorong dialog yang inklusif, dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Melalui diplomasi yang terampil dan kerjasama regional, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan aktor internasional lainnya untuk mencapai tujuan perdamaian dan rekonsiliasi. Selain itu, Indonesia juga dapat berperan dalam mendukung upaya pemulihan pascakonflik, termasuk membangun kembali infrastruktur, mendorong rekonsiliasi sosial, dan memfasilitasi proses transisi menuju pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis.

Indonesia telah berperan sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. Pada tahun 2014, Indonesia memimpin upaya mediasi melalui ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) untuk meredakan ketegangan politik di Myanmar setelah adanya kerusuhan antara etnis Rohingya dan penduduk Rakhine. Indonesia juga mendukung upaya mediasi melalui dialog antara pemerintah Myanmar dan kelompok etnis bersenjata (Matthew, 2020). Indonesia juga menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar untuk membahas isu-isu terkait konflik dan memberikan dukungan dalam upaya penyelesaian konflik. Upaya keterlibatan Indonesia ini bertujuan untuk mendorong dialog, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik di Myanmar dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan (Yang, 2023).

Meskipun tantangan yang kompleks terus ada, Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung upaya penyelesaian konflik di Myanmar dan mempromosikan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Ada beberapa hal yang diharapkan oleh Indonesia terhadap keterlibatannya dalam konflik di Myanmar yakni *perlindungan dan bantuan untuk pengungsi Rohingya*. Sebagai negara yang berbatasan dengan Myanmar, Indonesia mungkin berharap untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke wilayahnya; penghormatan HAM dan kebebasan berpendapat, Indonesia, sebagai negara dengan komitmen pada hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, mungkin juga berharap untuk mendorong Myanmar agar menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia warganya serta memfasilitasi kebebasan berekspresi dan partisipasi politik yang inklusif; dan Pemulihan kehidupan terhadap etnis Rohingya berdasarkan ekonomi dan hak asasi manusianya (Lamb, 2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diangkat yaitu “Mengapa Indonesia terlibat aktif terhadap konflik Rohingya di Myanmar?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas ialah mengetahui dan mendeskripsikan alasan keterlibatan aktif Indonesia terhadap krisis Rohingya di Myanmar yang merupakan masalah domestik di Myanmar

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari penulisan yang akan membahas mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan ditulis sehingga dapat membuat kerangka penelitian yang baik. Teori yang digunakan juga akan membantu penelitian dalam menggambarkan suatu fenomena, memecahkan masalah atau memahami topik yang ada (Sukma R. , 2003).

Regional Security Complex Theory

Regional Security complex Theory (RSCT) adalah teori hubungan internasional yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Waever. Laporan ini menawarkan perspektif alternatif terhadap pendekatan tradisional dalam memahami dinamika keamanan di tingkat regional. RSCT diperkenalkan pada awal tahun 1990an dan sejak itu menjadi berpengaruh dalam bidang studi keamanan. Kompleks keamanan regional (RSC) didefinisikan sebagai pola interaksi keamanan yang berbeda dan stabil antar aktor, yang dibedakan berdasarkan tingkat interaksinya. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa fitur-fitur keamanan di tingkat regional bersifat tahan lama dan mandiri, meskipun hal ini diperumit oleh keberadaan aktor-aktor yang memiliki kepentingan keamanan global dan kemampuan memproyeksikan kekuatan (Barry Buzan, 2009).

RSCT memberikan kerangka konseptual yang menangkap struktur baru keamanan internasional dan memiliki akar realis dan liberal, serta elemen konstruktivis. Teori ini dapat diterapkan dalam menganalisis kebijakan luar negeri, karena semakin banyak negara yang menjalankan kebijakan luar negeri di tingkat regional, dan teori ini menekankan pada tingkat analisis dan pola persahabatan dan permusuhan di seluruh kompleks, yang bergantung pada tindakan dan interpretasi para pemimpin dan aktor lain di negara tersebut.

Singkatnya, Teori Kompleks Keamanan Regional adalah kerangka kerja yang berharga untuk memahami keamanan internasional dari perspektif regional, menangkap pola hubungan keamanan di suatu wilayah dan interaksi antara mereka dan negara-negara di luar wilayah tersebut, termasuk kekuatan global.

Sekuritisasi Teori Copenhagen

Mazhab Kopenhagen dalam studi keamanan adalah aliran akademik yang dirintis oleh teoriwan hubungan internasional Barry Buzan lewat bukunya, *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*, yang pertama kali diterbitkan tahun 1983. Mazhab Kopenhagen lebih menekankan aspek-aspek sosial dari keamanan. Teoriwan yang sering dikaitkan dengan mazhab ini adalah Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde (Ensiklopedia, 2020).

Sekuritisasi dalam hubungan internasional, Mazhab Copenhagen adalah proses perubahan subjek menjadi persoalan “keamanan” oleh negara. Teori sekuritisasi (Teoriwan) menegaskan bahwa subjek yang berhasil tersekuritisasi mendapat lebih banyak ancaman dan dampak kepada keamanan. Dalam konteks politik internasional, sekuritisasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana isu seperti terorisme, penyalahsuganaan, dan konflik dasar bisa menjadi ancaman yang mempengaruhi kebijakan dan perilaku negara. Studi ini menggunakan konsep persepsi ancaman dan teori sekuritisasi yang dikembangkan Mazhab Copenhagen untuk menganalisis kebijakan penamaan ulang laut ini dan dampaknya terhadap hubungan antara Indonesia dan China (Ensiklopedia, 2020).

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka hipotesa yang dapat diambil untuk penelitian ini ialah:

- 1) Turunnya Stabilitas Regional di sekitar wilayah perbatasan Indonesia akibat arus pengungsi yang besar. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik atau ketegangan di negara-negara tetangga yang menghasilkan pengungsi dapat berpotensi mempengaruhi stabilitas di wilayah perbatasan Indonesia.
- 2) Peningkatan Masalah Kemanusiaan oleh pengungsi ke dalam wilayah penerima. Terjadinya tindak criminal,

penyeludupan manusia, pelanggaran norma-norma terhadap wilayah penerima oleh pengungsi yang dapat mengancam keamanan dan kenyamanan manusia di dalam negeri.

F. Jangkauan Penelitian

Karena akan ada banyaknya kecenderungan perkembangan yang diamati di dalam karya penelitian ini, maka diperlukan penetapan batasan masalah yang jelas dan fokus analisis. Jangkauan penelitian ini akan menganalisis mengenai upaya yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan Keamanan Manusia dan Regional dan alasan keterlibatan aktif Indonesia terhadap krisis Rohingya di Myanmar. Pada penelitian ini akan menggunakan referensi atau *literature review* pada tahun 2017-2023.

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder dalam penelitiannya. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan studi literatur yang relevan, serta jurnal, buku, artikel berita, website, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitik untuk menganalisis data dan fakta. Ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan fakta kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka teori yang disusun secara sistematis untuk menemukan korelasi antara fakta-fakta. Selain itu, penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa yang terkait dengan fokus masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

BABI : Pada bab ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, kerangka teoritis, tujuan penelitian, hipotesis, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan yang akan menjadi landasan dari ke-5 bab pada penelitian.

- BAB II** : Pada bab ini akan membahas Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia di Asia Tenggara dan Rohingya
- BAB III** : Pada bab ini akan membahas krisis kemanusiaan di Myanmar
- BAB IV** : Pada bab ini akan membahas alasan keterlibatan aktif Indonesia terhadap penyelesaian krisis Rohingya di Myanmar
- BAB V** : Pada bab terakhir, penulis akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.